

**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN SISTEM INFORMASI BASELINE PERMUKIMAN  
KUMUH (SIMBAKU)**

Sumber:

<https://simbaku.pesawarankab.go.id/pedoman-teknis>

<https://bit.ly/PedTekInovasiPRKP>

## **PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI BASELINE PERMUKIMAN KUMUH (SIMBAKU)**

### **I. PENDAHULUAN**

Secara umum, pembangunan permukiman menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Disisi lain populasi penduduk khususnya di wilayah perkotaan di Indonesia terus meningkat tajam antara 2000-2010, dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang per kilometer persegi. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran.

Persoalan air minum, kawasan kumuh dan sanitasi menjadi fokus utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia dan dunia. Target SDGs, bahkan menjadi sebuah Gerakan di Indonesia, 100-0-100 pada kurun 2014-2019 dengan tujuan agar masyarakat di seluruh Indonesia terlayani akses air minum dan air bersih 100%, 0% wilayah kumuh dan 100% terlayani akses sanitasi layak.

Sebagai perwujudan komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dalam RPJMN 2020 – 2024 Pemerintah Republik Indonesia setidaknya ada 4 isu strategis dalam hal perumahan dan permukiman meliputi:

1. Terbatasnya akses pembiayaan perumahan dimana ratio outstanding KPR terhadap GDP masih sekitar 2,9%.
2. 61,7% rumah tangga menempati hunian yang memenuhi minimal satu aspek ketidaklayakan dan sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh.
3. Masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan.
4. Perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl).

Terkait dengan isu strategis yang muncul maka penegasan akan arah kebijakan penanganan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui “Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”. Dalam RPJMN 2020-2024 Pemerintah Pusat menargetkan pengentasan kawasan kumuh sebesar ± 10.000 Ha, hal ini tentu saja mendorong

pemerintah Kabupaten untuk melakukan optimalisasi pencapaian target RPJMN dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh diwilayahnya dengan menggunakan tools yang ada dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.

Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong melakukan proses updating baseline kumuh di Kabupaten Pesawaran dengan melakukan serangkaian kajian dan melakukan pengukuran atas 7 Aspek dengan 16 Parameter atau yang disebut Baseline Numerik. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh dari hasil updating baseline kumuh tersebut dalam Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh (Simbaku).

## **II. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 116/IV.12/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesawaran, luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran mencapai 236,39 Ha. Surat Keputusan Bupati tahun 2021 ini merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Bupati tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, data numerik permukiman kumuh terdiri dari 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) parameter kekumuhan. Tujuh kriteria yang dimaksud meliputi 1) kondisi bangunan gedung, 2) kondisi jalan, 3) kondisi penyediaan air minum, 4) kondisi drainase lingkungan, 5) kondisi pengelolaan air limbah, 6) kondisi pengelolaan persampahan, dan 7) kondisi proteksi kebakaran.

Salah satu permasalahan yang kerap kali dialami oleh Pemerintah Daerah adalah data. Data dibutuhkan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengalami permasalahan terkait data, yaitu kurangnya data yang memadai terutama data permukiman kumuh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun data permukiman kumuh dalam suatu tool, yaitu sistem informasi baseline permukiman kumuh (simbaku). Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh (Simbaku) ini memuat data berupa numerik yang diperoleh dari hasil identifikasi, survey, dan verifikasi terhadap permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Diharapkan dengan adanya Simbaku ini, masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat lebih mudah mengakses informasi tentang permukiman kumuh. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh.

### **III. TUJUAN**

Tersedianya Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi dan data permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran sehingga Pemerintah Kabupaten dan Desa dapat mengambil kebijakan dan melakukan *action plan* untuk mengurangi kekumuhan. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan membantu Pemerintah dan Desa dalam menanggulangi kekumuhan.

### **IV. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh Kabupaten Pesawaran:

#### **a. Kebijakan**

Kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh merupakan kegiatan identifikasi dan pendataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran berikut infrastruktur permukiman. Kegiatan ini menghasilkan data baseline numerik permukiman kumuh dan peta permukiman kumuh sehingga profil permukiman kumuh tergambar. Dengan tersedia profil permukiman kumuh, Pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian permukiman kumuh. Perencanaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- menyusun rencana pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh
- menyusun rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh
- menyuaun rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan.
- menyusun rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian

#### **b. Sasaran kegiatan**

Sasaran kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh ini adalah perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pesawaran dan juga daerah yang berpotensi atau terduga kumuh.

c. Pendekatan kegiatan

Pendekatan kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut:

- Pendekatan eksploratif yang terdiri dari eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan informasi dan eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi.
- Pendekatan studi dokumenter meliputi inventarisasi dan eksplorasi berbagai dokumen terkait permukiman kumuh.
- Pendekatan perspektif dalam perumusan konsep pengembangan kawasan permukiman kumuh.
- Pemanfaatan teknologi: operator komputer menginput data hasil survey dan menampilkan data ke dalam website.

d. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh:

- Penentuan wilayah kegiatan: wilayah kegiatan Simbaku berdasarkan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran.
- Kolaborasi dengan Pemerintah Desa: Pemerintah Desa memberikan informasi permukiman di wilayah kerjanya.
- Pengumpulan data, meliputi pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder dilakukan dengan cara survey instansional. Data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan.
- Survey lapangan: tim survey Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan survey dan pendataan indikator dan parameter permukiman kumuh.
- Penginputan data: operator komputer menginput data hasil survey dan menampilkan data ke dalam website.

e. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran. Tugas monitoring dan evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran meliputi:

- Melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Simbaku.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja surveyor dan operator komputer.
- Melakukan pengecekan dan verifikasi data hasil survey lapangan.
- Melakukan survey lapangan bersama surveyor ke lokasi kawasan permukiman kumuh.
- Melakukan peningkatan kompetensi surveyor dan operator komputer.
- Menyusun laporan kegiatan dan data dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- Menyusun rekomendasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

## **V. KETENAGAAN**

Pelaksana kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh meliputi:

- a. Surveyor bidang kawasan permukiman
- b. Operator komputer bidang kawasan permukiman
- c. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran

## **VI. PELAPORAN**

Kegiatan Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh merupakan bagian dari sistem informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran. Surveyor dan operator melaporkan hasil kegiatannya baik secara elektronik dan non elektronik. Jenis laporan yang disampaikan, antara lain:

- a. Hasil survey lapangan
- b. Penginputan data
- c. Progres kegiatan

# Pedoman Teknis

Nama Teknis	Aksi
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI BASELINE PERMUKIMAN KUMUH	<a href="#">Lihat</a>